



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

#Ber  
**#AKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga  
melayani  
bangsa

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



*Komisi Yudisial RI*

**BIRO INVESTIGASI**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKj)  
BIRO INVESTIGASI  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Kramat Raya No. 57. Jakarta Pusat  
*Website:* [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)



## **KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77  
Faksimile: (021) 31903755 Website: [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)  
Email: [kyri@komisiyudisial.go.id](mailto:kyri@komisiyudisial.go.id)

---

### **PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BIRO INVESTIGASI TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Biro Investigasi, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Biro Investigasi, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2025

Kepala Biro Perencanaan dan  
Kepatuhan Internal

R. Adha Pamekas  
NIP 19690318 199603 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Investigasi Tahun 2024 ini dapat kami selesaikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Biro Investigasi ini sebagai bentuk evaluasi dan laporan pertanggung jawaban kinerja Biro Investigasi dalam menjalankan program dan kegiatan pada Biro Investigasi Tahun Anggaran 2024.

Alhamdulillah di tahun 2024, Biro Investigasi secara efektif dan efisien dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam melakukan investigasi pendalaman kasus atas laporan/informasi masyarakat tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, Penelusuran Rekam Jejak terhadap calon Hakim Agung, Deteksi Dini, Database Rekam Jejak Hakim yang Terintegrasi dan tugas-tugas lainnya sesuai capaian target yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada pimpinan, utamanya, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Sekretaris Jenderal KY serta semua pihak atas dukungan dan kerjasama baik dari Biro/Pusat yang ada di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial maupun pihak eksternal atas capaian kinerja Biro Investigasi pada tahun 2024 ini. Harapannya sinergi dengan seluruh *stakeholder* dapat tetap berjalan dengan baik di tahun mendatang, juga capaian kinerja Biro Investigasi jauh lebih baik lagi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Biro Investigasi



Handarbeni Sayekti, S.H., M.H  
NIP 19740802 199803 2 004

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2024, Biro Investigasi memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 5.204.501.000 (lima miliar dua ratus empat juta lima ratus satu ribu dua ratus rupiah), namun pagu setelah revisi menjadi Rp. 5.031.047.000 (lima miliar tiga puluh satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.009.510.665 (lima miliar sembilan juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) atau 99,57%.

Dalam hal capaian kinerja Biro Investigasi telah berkontribusi pada Sasaran Program Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yaitu "Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar" dan indikator "Kualitas Profil Hakim Sesuai dengan Standar" dengan target 90%. Sumber data Indikator kualitas profil hakim sesuai standar tersebut diambil dari seluruh capaian target kinerja Biro Investigasi. Di tahun 2024 Biro Investigasi telah memenuhi seluruh target kinerjanya sebesar 100% antara lain:

**Sasaran Kegiatan 1:** Tersedianya Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi, dengan indikator Persentase Database Rekam Jejak hakim yang terintegrasi dan terpetakan tercapai 106%

**Sasaran Kegiatan 2:** Tersedianya data deteksi dini yang berkualitas, dengan indikator:

1. Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini tercapai 100%
2. Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti tercapai 100%

**Sasaran Kegiatan 3:** Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu, dengan indikator Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti tercapai 107%

Berdasarkan seluruh data capaian kinerja di atas, Biro Investigasi telah mendukung Sasaran Program Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yaitu "Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar" sebesar 100%, artinya melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90%.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. VISI, MISI, DAN SASARAN KEGIATAN .....	2
D. GAMBARAN UMUM BIRO INVESTIGASI .....	3
E. SUMBER DAYA MANUSIA .....	5
F. ISU STRATEGIS.....	7
G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN .....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	9
A. Target Kinerja .....	9
B. Perjanjian Kinerja.....	10
C. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024 .....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. KONTRIBUSI BIRO INVESTIGASI TAHUN 2024 DALAM PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM SETJEN KOMISI YUDISIAL .....	13
B. CAPAIAN KINERJA BIRO INVESTIGASI TAHUN 2024.....	14
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	15
1. Sasaran Kegiatan 1 Tersedianya Database Rekam Jejak Hakim Terintegrasi ...	16
2. Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini .....	19
3. Sasaran Kegiatan 3 Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu.....	22
D. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN	26
E. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	30
F. REALISASI ANGGARAN.....	32
BAB IV PENUTUP.....	34

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Biro Investigasi .....	4
Gambar 2. Status Kepegawaian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b> 5
Gambar 3. Berdasarkan Jenis Kelamin.....	6
Gambar 4. Latar Belakang Pendidikan .....	6
Gambar 5. Tampilan Database Rekam Jejak Hakim Terintegrasi.....	17
Gambar 6. Tampilan Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI) .....	18

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 SDM Berdasarkan Status Kepegawaian .....	5
Tabel 1. 2 SDM Berdasarkan Jenis Kelamin .....	5
Tabel 1. 3 SDM Berdasarkan Pendidikan .....	6
Tabel 1. 4 Isu Strategis Biro Investigasi .....	7
Tabel 1. 5 Strategi Pencapaian Kinerja .....	7
Tabel 2. 1 Target Kinerja Biro Investigasi .....	9
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Biro Investigasi .....	10
Tabel 2. 3 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024 .....	11
Tabel 3. 1 Sasaran Kegiatan 2024 .....	13
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Biro Investigasi Tahun 2024 .....	15
Tabel 3. 3 Rumus Hitung Integrasi Database Rekam Jejak Hakim .....	16
Tabel 3. 4 Persandingan Target dan Realisasi Database .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 5 Laporan Masyarakat terhadap Pengadilan Pajak .....	20
Tabel 3. 6 Persandingan Target dan Realisasi Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini .....	21
Tabel 3. 7 Persandingan Target dan Realisasi Rekomendasi Hasil Deteksi Dini .....	22
Tabel 3. 8 Laporan dari Jejaring/Informan di Daerah .....	23
Tabel 3. 8 Rumus Hitung Pendalaman Kasus .....	25
Tabel 3. 9 Persandingan Target dan Realisasi Pendalaman Kasus Terkait Dugaan Pelanggaran KEPPH yang Ditindaklanjuti .....	26
Tabel 3. 10 Efisiensi Anggaran .....	30
Tabel 3. 11 Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 .....	32

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja berisi pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Melalui Laporan Kinerja Biro Investigasi ini menggambarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan realisasi anggaran setiap bulannya. Dalam menyusun Laporan Kinerja ini Biro Investigasi berpedoman pada Renstra Biro Investigasi tahun 2020-2024 serta Renja Biro Investigasi Tahun 2024.

Tahun 2024 adalah tahun kelima (terakhir) implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Biro Investigasi tahun 2020-2024 yang merupakan pelaksanaan Renstra Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial 2020-2024. Kedudukan Biro Investigasi termaktub dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam Undang-Undang hasil revisi tersebut tugas investigasi disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial: “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup.”

Selanjutnya dalam pasal 26 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Biro Investigasi memiliki tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup dan penyediaan informasi rekam jejak Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah

Agung. Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pasal 8 Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial, Biro Investigasi di bawah koordinasi Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasarkan siklus anggaran yang berjalan, yaitu selama satu tahun. Maksud dan tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi. LKjIP juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Adapun maksud disusunnya LKjIP ini adalah:

1. Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan akuntabel;
2. Wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran selama Tahun Anggaran 2024 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu, LKjIP ini juga memiliki tujuan:

1. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja selama Tahun Anggaran 2024 yang merupakan tahun kelima Renstra KY Tahun 2020-2024;
2. Sebagai bahan evaluasi di tahun 2024 dan untuk bahan acuan, perbaikan serta peningkatan kinerja di tahun berikutnya;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menerapkan asas transparansi, sistematis dan akuntabel.

## **C. VISI, MISI DAN SASARAN KEGIATAN**

### **1. VISI**

Dalam Renstra Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 dengan jelas disebutkan bahwa Visi KY adalah “Terwujudnya Komisi Yudisial Yang Kredibel Untuk Akuntabilitas Hakim”. Perwujudan dari Visi KY tersebut diturunkan ke setiap unit kerja di Sekretariat Jenderal. Biro Investigasi merupakan unit di bawah Sekretariat Jenderal tidak bisa lepas dari Visi KY

secara kelembagaan. Visi Biro Investigasi Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Biro Investigasi Yang Kredibel dan Profesional dalam rangka mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial”**

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan yang akan mengarahkan kita untuk menuju pada kondisi yang akan dicapai di masa depan. Visi akan diwujudkan oleh seluruh jajaran di Biro Investigasi. Untuk memperjelas visi tersebut, maka akan diuraikan pengertian kata-kata sebagai berikut: Kredibel: Melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dipercaya publik dan bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya; Profesional : Memiliki kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan, menguasai bidang ilmu pengetahuan yang digeluti secara mendalam, mampu melakukan kreativitas dan inovasi serta menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

## **2. Misi**

Misi Komisi Yudisial merupakan penjabaran dari cita-cita dan landasan kerja organisasi serta merupakan fondasi dari perencanaan strategik Komisi Yudisial 2020-2024. Misi Biro Investigasi Komisi Yudisial 2020-2024, dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan fungsi *early warning* dan *early detection* melalui pelibatan aktif masyarakat yang peduli terhadap peradilan bersih;
- 2) Mengembangkan Investigasi berbasis Teknologi Informasi, database rekam jejak hakim yang terintegrasi, dan pemenuhan alat khusus investigasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan investigasi secara efektif dan efisien;
- 3) Mengembangkan kualitas Investigator dalam rangka pelaksanaan kegiatan investigasi secara profesional dan akuntabel.

## **D. GAMBARAN UMUM BIRO INVESTIGASI**

Secara umum Kedudukan investigasi termaktub dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam Undang-Undang hasil revisi tersebut tugas investigasi disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2011

tentang Komisi Yudisial: “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

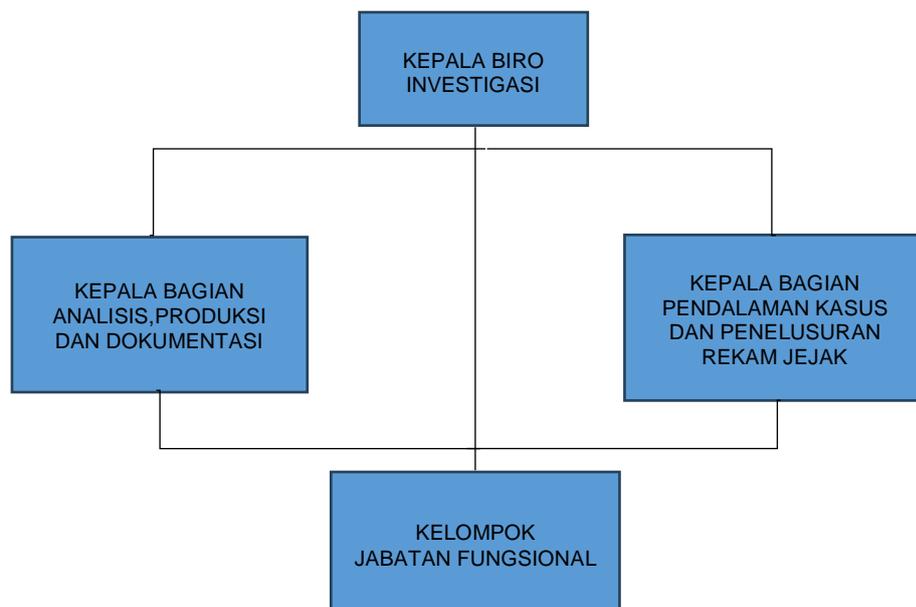
- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup.”

Undang-undang di atas diimplementasikan lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Yudisial tahun 2013. Berdasarkan pasal 8 Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial, dalam melaksanakan tugasnya Biro Investigasi di bawah koordinasi Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial.

Selanjutnya, dalam pasal 26 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Biro Investigasi memiliki tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup dan penyediaan informasi rekam jejak Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung

Adapun struktur Biro Investigasi berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

**Gambar 1. Struktur Biro Investigasi**

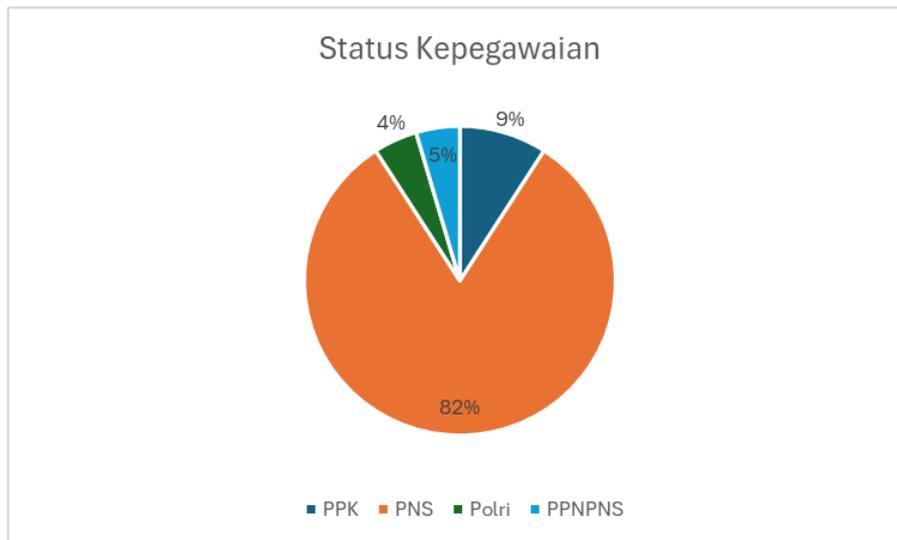


**E. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

**Tabel 1.1. Berdasarkan Status Kepegawaian**

UNIT KERJA	BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN				JUMLAH
	PPPK	PNS	POLRI	PPNPNS	
Biro Investigasi	2	18	1	1	22

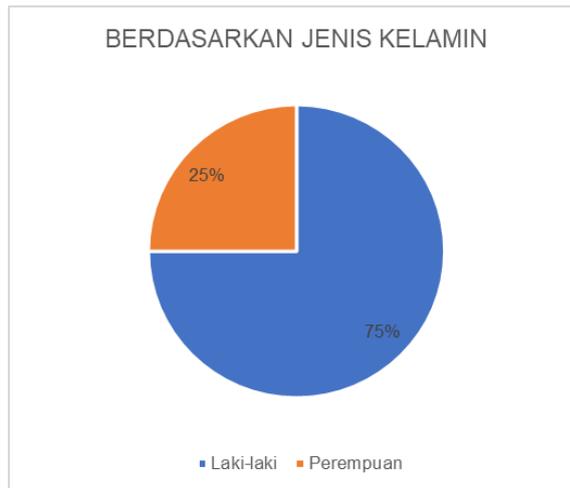
**Gambar 2. Status Kepegawaian**



**Tabel 1.2. Berdasarkan Jenis Kelamin**

UNIT KERJA	BERDASARKAN JENIS KELAMIN		JUMLAH
	L	P	
Biro Investigasi	16	6	22

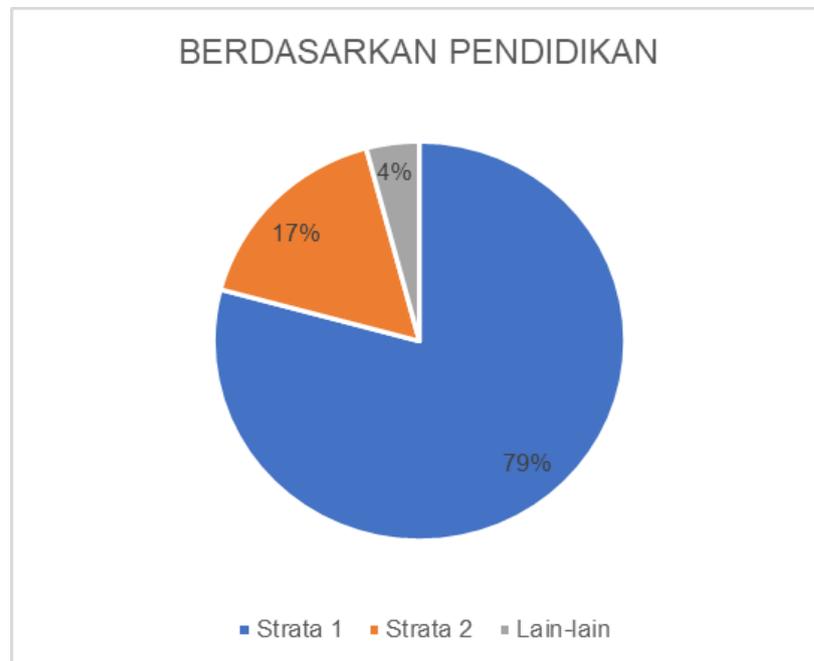
**Gambar 4. Berdasarkan Jenis Kelamin**



**Tabel 1.3. Berdasarkan Pendidikan**

1. UNIT KERJA	BERDASARKAN PENDIDIKAN			JUMLAH
	LAIN-LAIN	S-1	S2	
Biro Investigasi	1	16	5	22

**Gambar 5. Latar Belakang Pendidikan**



## F. ISU STRATEGIS

Arah dan kebijakan strategi Komisi Yudisial dalam Rencana Strategi Komisi Yudisial (Renstra KY) periode 2020-2024. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Biro Investigasi periode 2020 – 2024 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Melalui Renstra 2020-2024, Biro Investigasi berupaya mendukung Renstra KY untuk meningkatkan integritas hakim dalam menyediakan profile hakim sesuai dengan standar dengan merumuskan strategi sebagai berikut:

**Table 1.4. Isu Strategis Biro Investigasi**

No.	Arah Kebijakan	Strategi
	Menyediakan profile hakim sesuai dengan standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya peta data rekam jejak hakim</li> <li>• Pelaksanaan deteksi dini peradilan</li> <li>• Pelaksanaan kegiatan pendalaman kasus</li> </ul>

Untuk memastikan pencapaian dari arah kebijakan Biro Investigasi dalam menyediakan profile hakim sesuai dengan standar, maka perlu dibuat juga strategi untuk mencapai profile hakim yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di unit-unit yang ada di Biro Investigasi, sebagai berikut:

**Table. 1.5 Strategi Pencapaian Kinerja**

Strategi	Standar Kualitas	PIC Bagian
Adanya peta data rekam jejak seluruh hakim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas penyelesaian pemetaan data rekam jejak hakim</li> <li>• Kualitas profile data rekam jejak hakim</li> <li>• Kualitas database rekam jejak hakim yang terintegrasi</li> <li>• Kualitas database rekam jejak hakim yang terpetakan</li> <li>• Kualitas Penyelesaian database dugaan pelanggaran KEPPIH</li> <li>• Kualitas Penyelesaian pemetaan badan peradilan</li> <li>• Kualitas penyelesaian pengembangan sistem informasi investigasi yang terintegrasi</li> </ul>	BAGIAN ANPRODOK DAN PKPRJ
Pelaksanaan deteksi dini peradilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas penyelesaian laporan pemetaan data hakim Deteksi Dini (DD)</li> <li>• Kualitas penyelesaian laporan validasi tema DD</li> <li>• Kualitas penyelesaian laporan DD</li> <li>• Kualitas penyelesaian rekomendasi DD</li> <li>• Kualitas penyelesaian tindak lanjut DD</li> </ul>	BAGIAN ANPRODOK
Pelaksanaan kegiatan pendalaman kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas Penyelesaian laporan atensi</li> <li>• Kualitas penyelesaian penyusunan unsur-unsur utama keterangan (UUK)</li> <li>• Kualitas penyelesaian penyusunan rencana penugasan (Rengas)</li> <li>• Kualitas penyelesaian penyusunan penjabaran tugas (Bargas)</li> <li>• Kualitas penyelesaian laporan informasi (Lapinfo)</li> <li>• Kualitas penyelesaian laporan penugasan (Laggas)</li> <li>• Kualitas penyelesaian laporan investigasi (LI)</li> </ul>	BAGIAN PKPRJ DAN ANPRODOK

## **G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) terdiri dari 4 (empat) BAB dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan:**
  - latar belakang
  - maksud dan tujuan
  - visi, misi, dan sasaran kegiatan
  - gambaran umum biro investigasi
  - sumber daya manusia
  - isu strategis
  - sistematika penyusunan
  
- 2) Bab II Perencanaan Kinerja**
  - target kinerja
  - perjanjian kinerja
  - rencana kegiatan dan anggaran tahun 2024
  
- 3) BAB III Akuntabilitas Kinerja**
  - kontribusi biro investigasi tahun 2024 dalam pencapaian sasaran program dan sasaran strategis
  - capaian kinerja biro investigasi tahun 2024
  - analisis capaian kinerja
  - analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
  - program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
  - realisasi anggaran
  
- 4) Bab IV Penutup**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. TARGET KINERJA

Sesuai Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024, Biro Investigasi berupaya mendukung Renstra KY untuk meningkatkan integritas hakim dalam menyediakan profil hakim sesuai dengan standar. Program Peningkatan Integritas Hakim merupakan program yang mencerminkan tugas dan fungsi utama Komisi Yudisial. Program ini mencakup pelaksanaan tugas-tugas utama Komisi Yudisial dalam proses peningkatan kapasitas hakim dan integritas hakim mencakup pelayanan peningkatan pengawasan hakim, penguatan kapasitas profiling data hakim. Sasaran strategis KY tersebut diturunkan menjadi target kinerja di setiap unit biro.

**Table 2.1 Target Kinerja Biro Investigasi**

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator		Target				
Sasaran						
Kegiatan Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim Agung		2020	2021	2022	2023	2024
<b><u>Sasaran Kegiatan 1</u></b>						
Tersedianya database rekam jejak hakim yang terintegrasi						
1	Persentase database rekam jejak yang terintegrasi dan dipetakan	75%	80%	85%	90%	95%
<b><u>Sasaran Kegiatan 2</u></b>						
Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini yang Berkualitas						
1	Tingkat kualitas data deteksi dini	Cukup	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
2	Rekomendasi hasil deteksi dini yang ditindaklanjuti	1	1	1	1	1
<b><u>Sasaran Kegiatan 3</u></b>						
Terlaksananya kegiatan pendalaman kasus tertentu						

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim Agung						
1	Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

#### B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Biro Investigasi menetapkan perjanjian kinerja sebagai berikut:

**Table 2.2. Perjanjian Kinerja Biro Investigasi**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya kegiatan Pendalaman kasus tertentu	Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti	100%
2	Tersedianya database rekam jejak hakim yang terintegrasi	persentase database rekam jejak hakim yang terintegrasi dan terpetakan	95%
3	Tersedianya data deteksi dini yang berkualitas	Tingkat kualitas data deteksi dini	Sangat Baik
		Rekomendasi hasil deteksi dini yang ditindaklanjuti	1 rekomendasi

#### C. RENCANA KEGIATAN dan ANGGARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja

tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu tahun tertentu. Rincian rencana kerja Biro Investigasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Table 2.3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024**

Kode	Uraian KRO/RO/Komponen	Target	Anggaran (Rp)
<b>3866</b>	<b>Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim</b>		<b>5.204.501.000</b>
<b>3866.02.BIB</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat</b>		
<b>3866.BIB.001</b>	<b>Investigasi Awal di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung</b>	<b>12 laporan</b>	<b>58.800.000</b>
<b>051</b>	Pelaksanaan Investigasi Awal di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung	12 Laporan	58.800.000
<b>3866.BIB.U02</b>	<b>Laporan Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>1.012.327.000</b>
<b>053</b>	Pemetaan dan Identifikasi Data Laporan/Informasi		276.379.000
<b>055</b>	Penyelenggaraan Investigasi Penanganan Laporan/Informasi	12 Laporan	735.948.000
<b>3866.BIB.U03</b>	<b>Investigasi Pendalaman Kasus</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>377.628.000</b>
<b>051</b>	Analisis Kasus		4.992.000
<b>052</b>	Penyusunan Laporan Hasil Analisis		4.992.000
<b>053</b>	Penyelenggaraan Investigasi Pendalaman Kasus (STO)		303.348.000
<b>054</b>	Ekspos hasil Investigasi Pendalaman Kasus (STO)		64.296.000
<b>3866.BIB.U04</b>	<b>Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim Agung</b>	<b>40 Orang</b>	<b>2.000.000.000</b>
<b>051</b>	Pengumpulan dan Penyiapan Bahan Data Awal Calon Hakim Agung		58.280.000
<b>052</b>	Penyelenggaraan Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim Agung	40 Laporan	1.879.920.000
<b>053</b>	Penyusunan Laporan, Ekspose dan Evaluasi Hasil Penelusuran Rekam Jejak Calon Hakim dan Calon Hakim Agung		61.800.000
<b>3866.03.BIB.U05</b>	<b>Investigasi pencegahan pelanggaran disiplin dan etik</b>	<b>2 laporan</b>	<b>590.746.000</b>
<b>051</b>	Pemetaan dan Penelitian Awal		36.154.000
<b>052</b>	Validasi isu Investigasi Deteksi Dini		413.660.000

Kode	Uraian KRO/RO/Komponen	Target	Anggaran (Rp)
<b>B</b>	<b>Investigasi Bersama Secara Tersembunyi (Mysterious Shopper)</b>		<b>226.100.000 (Blokir/AA)</b>
<b>053</b>	Penyusunan Analisis dan Usulan Rekomendasi		140.932.000
<b>3866.BIB</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat</b>		
<b>3866.BIB.002</b>	<b>Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim</b>	<b>1038 orang</b>	<b>1.165.000.000</b>
<b>051</b>	<b>Pemetaan dan pemutakhiran Database Rekam Jejak Hakim</b>		<b>702.327.000 (Blokir/AA)</b>
<b>B</b>	Profiling Hakim Berkelanjutan		518.376.000
<b>C</b>	Pembentukan dan Pembinaan Informan Strategis		115.840.000
<b>052</b>	Pemutakhiran dan Pengembangan Sistem Informasi Database Rekam Jejak Hakim Terintegrasi		156.000.000
<b>053</b>	Pemeliharaan dan Pendokumentasian Arsip Database Rekam Jejak Hakim		147.913.000
<b>054</b>	Evaluasi dan Diseminasi Kinerja Biro Investigasi		158.760.000

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. KONTRIBUSI BIRO INVESTIGASI TAHUN 2024 DALAM PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM

Capaian kinerja Biro Investigasi berkontribusi pada Sasaran Program Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yaitu “Tersedianya Profile Hakim Sesuai dengan Standar” dan indikator ”kualitas profil hakim sesuai dengan standar” dengan target 90%. Standar yang dimaksud adalah data tersebut telah memuat identitas pribadi, dan data primer lainnya serta data sesuai standar masing-masing laporan kinerja Biro Investigasi.

Metode pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah database hakim sesuai standar} \times 100\%}{\text{jumlah data hakim yang direkam jejak}}$$

Sumber data Indikator kualitas profil hakim sesuai standar tersebut diambil dari sistem database terintegrasi yaitu sistem SIJAKIM. Sistem tersebut mengintegrasikan output data-data hakim yang ada pada seluruh kegiatan di Komisi Yudisial. Tahun 2024, profile hakim yang telah dilakukan updating data pada system SIJAKIM adalah sebanyak 1050 database hakim sehingga perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah data hakim sesuai standar} \times 100\%}{\text{Jumlah database rekam jejak hakim tahun berjalan}} \\ & = \frac{1050}{1038} \times 100\% = 101,16\% \end{aligned}$$

Jumlah data hakim sesuai standar adalah jumlah data hakim yang sesuai standar yaitu standar masing-masing laporan, contoh 1) data PRJ: data pribadi, Integritas, profesionalisme, keyakinan profesional; 2) data PK: data pribadi, Pelanggaran KEPPH, dll.

Sehingga capaian Sasaran Program Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yaitu “Tersedianya Profile Hakim Sesuai dengan Standar” dengan indikator ”kualitas profil hakim sesuai dengan standar” dengan target 90% tercapai 112,40%

Program database rekam jejak hakim yang terintegrasi telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan

## B. CAPAIAN KINERJA BIRO INVESTIGASI

Tahun 2024, Biro Investigasi memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 5.204.501.000 (lima miliar dua ratus empat juta lima ratus satu ribu juta rupiah), namun pagu setelah revisi menjadi Rp. 5.031.047.000 (lima miliar tiga puluh satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.009.510.665 (lima miliar sembilan juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) atau 99,57%. Besaran anggaran di atas dialokasikan ke dalam ke dalam program/kegiatan sebagaimana terlihat di bawah ini:

**Tabel 3.2. Capaian Kinerja Biro Investigasi Tahun 2024**

Kegiatan Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim Agung		Target	Realisasi	% Capaian
<b>Sasaran Kegiatan 1:</b> Tersedianya Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi				
Persentase Database Rekam Jejak hakim yang terintegrasi dan terpetakan		95%	101%	106%
<b>Sasaran Kegiatan 2:</b> Tersedianya data deteksi dini yang berkualitas				
1.	Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini	Sangat Baik	Sangat Baik	100%
2.	Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti	1 Rek	1	100%
<b>Sasaran Kegiatan 3:</b> Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu				
Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti		100%	107%	107%

## C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### 1. Capaian Sasaran Kegiatan 1; Tersedianya Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tersedianya Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi	Persentase Database Rekam Jejak yang terintegrasi dan terpetakan	95%	101%	106%

### **Pengukuran Kinerja**

Pengukuran capaian sasaran kegiatan 1, 'Tersedianya Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi' diukur dari capaian kinerja pada indikator "Persentase Database Rekam Jejak Yang Terintegrasi dan Dipetakan". Pengukuran indikator tersebut menggunakan rumus hitung: *Jumlah Data hakim yang sesuai standar/Jumlah Data Rekam Jejak Tahun Berjalan X 100%*. Capaian Indikator kinerja database rekam jejak yang terintegrasi dan dipetakan pada tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

**Table 3.3 Rumus Hitung Integrasi Database Rekam Jejak Hakim**

Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi dan dipetakan	1038 (seribu tiga puluh delapan)	Rumus Hitung: $\frac{\text{Jumlah data hakim sesuai standar}}{\text{Jumlah database rekam jejak tahun berjalan}} \times 100\%$
Jumlah database rekam jejak hakim yang ada pada pada tahun 2024	1050 (seribu lima puluh)	Realisasi: $\frac{1050}{1038} \times 100\% = 101\%$
<p>Catatan:</p> <p>Jumlah data hakim sesuai standar adalah jumlah data hakim yang sesuai standar yaitu standar masing-masing laporan, contoh 1) data PRJ: data pribadi, Integritas, profesionalisme, keyakinan professional; 2) data PK: data pribadi, Pelanggaran KEPPH, dll.</p> <p>Program database rekam jejak hakim yang terintegrasi telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.</p>		

Basis data rekam jejak yang digunakan dalam formulasi tersebut adalah:

- data seluruh rekam jejak hakim berdasarkan hasil penelusuran rekam jejak hakim dan calon hakim agung pada tahun berjalan berjumlah: 43 orang

- data seluruh rekam jejak hakim berdasarkan data profiling hakim oleh informan/jejaring pada tahun berjalan (SBML) berjumlah: 12 orang
- data hakim yang pernah dilakukan advokasi berjumlah: 20 orang
- data hakim di waskim yang sudah diplenokan berjumlah: 150 orang
- data hakim investigasi penanganan dugaan pelanggaran KEPPH berjumlah: 13 orang
- data hakim investigasi pendalaman kasus (STO) berjumlah: 2 orang
- data hakim kegiatan PRJ berkala berjumlah: 10 orang
- data hakim yang mengikuti pelatihan PKH berjumlah: 610 orang
- data hakim hasil pemantauan berjumlah: 105 orang
- data sanksi Bawas MA yang telah diinput ke S IMI (Sistem Manajemen Informasi Investigasi): 85 orang

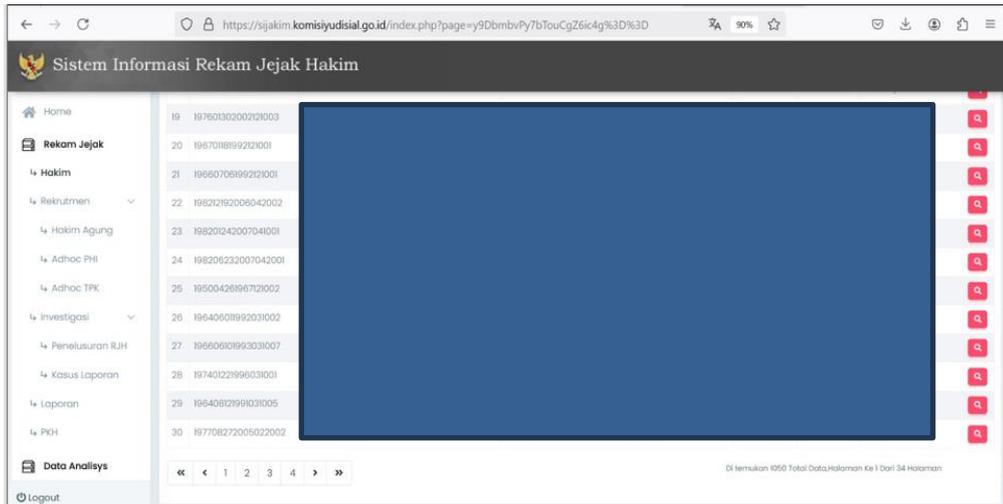
**Total data hakim yang telah diintegrasikan di tahun 2024 sebanyak 1050 orang. Total data hakim ini melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 1038 orang. Apabila dihitung berdasarkan indikator Persentase Database Rekam Jejak yang terintegrasi dan terpetakan harus mencapai target 95%. Realisasi tersebut melebihi target sebesar 101% ( $1050/1038 = 101\%$ ). Sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar  $101/95=106\%$ .**

Analisis perbandingan antara target tahun 2024, realisasi 2023, 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

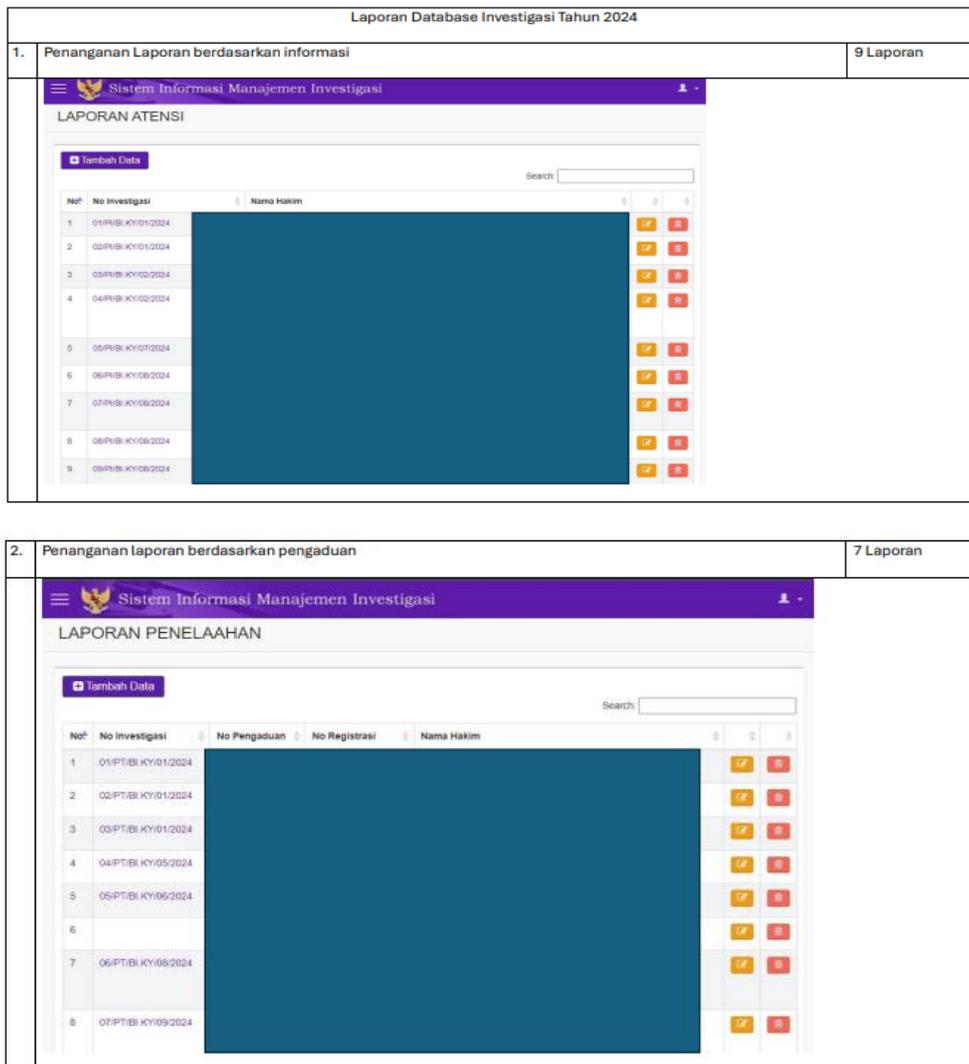
**Tabel 3.4 Persandingan Target dan Realisasi Database Rekam Jejak Hakim dengan Renstra**

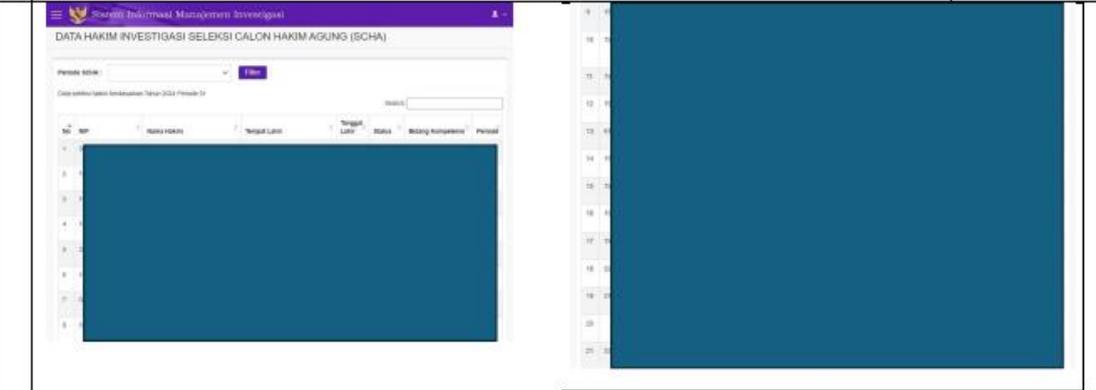
IKU	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi								
Persentase Database Rekam Jejak yang terintegrasi dan terpetakan	75%	75%	80%	80%	85%	85%	90%	113,84%	95%	101%

**Gambar 5. Tampilan Database Rekam Jejak Hakim Terintegrasi**



**Gambar 6. Tampilan Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI)**



3. Laporan Rekam Jejak Hakim tahun 2024	43 Laporan
	

## 2. Capaian Sasaran Kegiatan 2; Terlaksanananya Kegiatan Deteksi Dini

Terlaksanananya Kegiatan Deteksi Dini diukur dari capaian kinerja pada 2 (dua) indikator yaitu:

- 1) Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini;
- 2) Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tersedianya data deteksi dini yang berkualitas	1) Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini	Sangat Baik	Sangat Baik	100%
	2) Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti	1 Rek	1	100%

Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, menyebutkan bahwa salah satu wewenang Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam implementasinya, selama ini Biro Investigasi hanya melakukan kegiatan investigasi yang bersifat represif, sebagai penanganan atas informasi/laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) oleh hakim yang bersifat kasuistis dan personal. Kasuistis menyangkut fakta mengenai peristiwa, keadaan, perbuatan atau perilaku hakim tersebut sedangkan personal menyangkut pribadi hakim yang diduga melanggar KEPPH. Selain itu, Komisi Yudisial juga sering menerima laporan/informasi yang "tidak secara langsung berkaitan dengan pelanggaran KEPPH, namun berpotensi menjadi penyebab pelanggaran KEPPH"

Sebagai langkah antisipatif dalam rangka mencegah terjadinya potensi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Biro Investigasi pada tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan Deteksi Dini dengan mengangkat tema terkait Kerawanan Pengadilan Pajak. Tujuan mengangkat tema/isu tersebut adalah: 1) Untuk mengetahui bentuk-bentuk kerawanan pada hakim dan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa pajak sebelum adanya peralihan pembinaan kepada MA, 2) untuk mengetahui potensi pelanggaran KEPPH yang diakibatkan dari kerawanan dalam menyelesaikan sengketa pajak, dan 3) untuk memberikan usulan rekomendasi kepada Ketua Bidang Pengawasan Perilaku Hakim dan Investigasi terkait kerawanan dalam menyelesaikan sengketa pajak.

Berdasarkan data Komisi Yudisial selama periode 2019 s.d. 2024 diketahui hanya terdapat beberapa laporan dan pemantauan terhadap hakim pengadilan pajak dengan data sebagaimana tersebut:

**Tabel 3.5 Laporan Masyarakat terhadap Pengadilan Pajak**

Tahun	Laporan	Pemantauan	Jumlah
2019	4	2	6
2020	1	0	1
2021	-	-	-
2022	0	1	1
2023	15	8	23
2024	0	0	0

### Pengukuran Kinerja

Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini diukur dari capaian kinerja pada 2 (dua) indikator yaitu: Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini, dan Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti.

- 1) **Pengukuran IKU pertama dari terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini adalah Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini.**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tersedianya Data Deteksi Dini yang berkualitas	Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini	Sangat Baik	Sangat Baik	100%

Pencapaian kinerja pada indikator “Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini” dari target Baik dapat terealisasi dengan hasil Baik. Pengukuran Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini tahun 2024 diukur melalui beberapa variabel antara lain :

- a. Adanya rumusan masalah:
  - Bagaimana bentuk kerawanan pada hakim pengadilan pajak yang terjadi sebelum adanya peralihan pembinaan kepada MA
  - Bagaimana potensi pelanggaran KEPPH yang diakibatkan dari kerawanan pada pengadilan pajak
- b. Terselenggaranya Validasi Isu;
 

Dalam rangka menghasilkan laporan rekomendasi DD tersebut, maka telah dilakukan kegiatan validasi isu deteksi dini
- c. Mampu menjawab permasalahan;
 

Dalam laporan yang telah disusun telah menjawab permasalahan atas isu yang dianalisis
- d. Adanya usulan rekomendasi;
 

Adanya usulan rekomendasi atas isu deteksi dini
- e. Jumlah data bernilai A1 sebesar 60%.

Sasaran kegiatan Deteksi Dini (DD) pada tahun 2024 ini telah terlaksana berupa Laporan Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Tahun 2024 yang telah disusun dan dilaporkan kepada Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY. Dalam rangka menghasilkan laporan rekomendasi tersebut, maka telah dilakukan kegiatan validasi isu Deteksi Dini di 2 (dua) wilayah, yaitu: Jakarta dan Yogyakarta. Kegiatan Deteksi Dini ini menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang telah disampaikan kepada Ketua Bidang Pengawasan Perilaku Hakim dan Investigasi dan disetujui bahwa rekomendasi ditindaklanjuti dengan disampaikan kepada Pimpinan.

**Tabel 3.7. Persandingan Target dan Realisasi Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini**

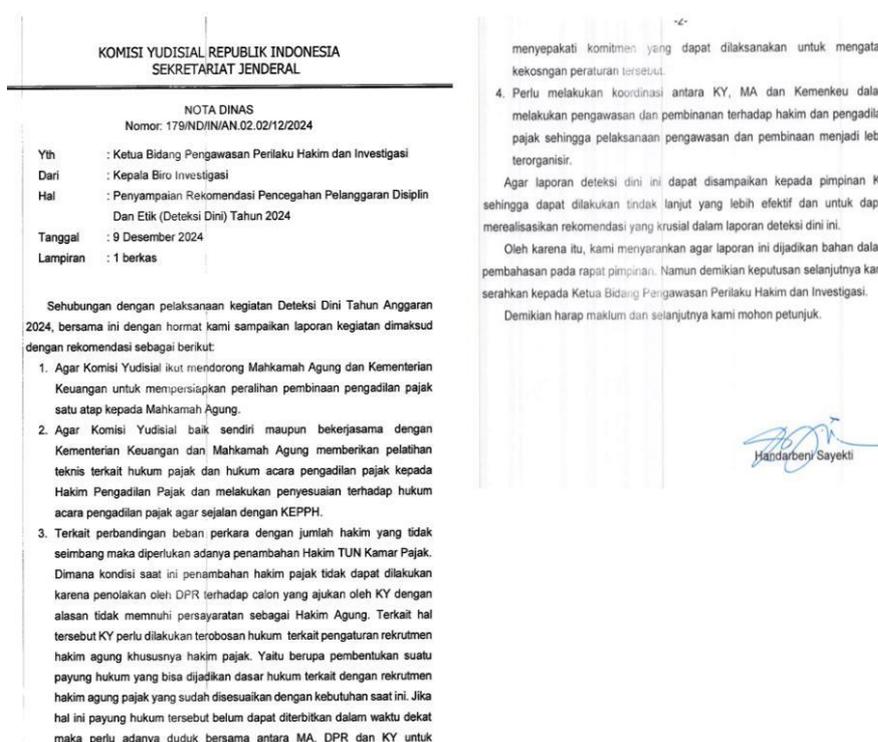
IKU	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Rekomendasi Hasil Deteksi Dini yang Ditindaklanjuti	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

2) Pengukuran IKU Kedua Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini adalah Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tersedianya Data Deteksi Dini Yang Berkualitas	Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti	1 Rek	1	100%

Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti berupa penyampaian Nota Dinas dari Kepala Biro Investigasi Nomor: 179/ND/IN/AN.0202/12/2024 Kepada Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi (Kabid Waskim dan Investigasi).

**Gambar. Nota Dinas Rekomendasi Deteksi Dini Ke Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi**



Analisis perbandingan antara target tahun 2024, realisasi 2023, 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7 Persandingan Target dan Realisasi Rekomendasi Hasil Deteksi Dini**

IKU	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi								
Rekomendasi Hasil Deteksi Dini yang Ditindaklanjuti	1 Rek	1 Rek								

### 3. Capaian Sasaran Kegiatan 3; Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu	Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Sasaran kegiatan 3, 'Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu' yang dilakukan oleh Biro Investigasi tahun 2024 melalui beberapa kegiatan yaitu:

#### a. **Investigasi Penanganan Laporan/Informasi Masyarakat**

Investigasi Penanganan Laporan/Informasi Masyarakat termasuk dalam rangkaian proses penanganan laporan/informasi dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim yang diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat. Investigasi Pendalaman Kasus merupakan tindak lanjut laporan/informasi dari masyarakat atau informan yang belum memenuhi saksi/bukti yang cukup dalam rangka pembuktian KEPPH.

Telah dilakukan investigasi penanganan laporan/informasi dugaan pelanggaran Kode Etik sebanyak **13 kasus** pada wilayah:

- Riau
- Jakarta
- Jawa Barat
- Jawa Tengah (2 Laporan/kasus)

- Jawa Timur (3 Laporan/kasus)
- Kalimantan Timur
- Sulawesi Tenggara
- Gorontalo
- Nusa Tenggara Timur
- Papua Barat

**b. Investigasi Pendalaman Kasus (STO)**

Berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim, Biro Investigasi juga menyelenggarakan kegiatan Investigasi Pendalaman Kasus (STO). Kegiatan ini dilakukan terhadap informasi/laporan (baik dari jejaring/informan maupun masyarakat) yang belum memiliki kejelasan tentang konstruksi peristiwa pelanggaran KEPPH, ada atau tidaknya bukti/saksi, bahkan nama hakim yang dilaporkan, dan/atau justru baru merupakan potensi terjadi pelanggaran KEPPH. Dalam hal ini, kegiatan pengumpulan bahan keterangan memiliki tingkat kesulitan tinggi dan berkelanjutan sehingga membutuhkan waktu relatif lama di lapangan.

Kegiatan STO dilakukan **terhadap 2 (dua) kasus** dengan sebaran wilayah di Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan Bali. Satu kasus ditindaklanjuti dengan meneruskan ke Biro Pengawasan Perilaku Hakim untuk Dilakukan pemeriksaan. Satu kasus lainnya, ditutup karena belum terbukti dan sebagai tindaklanjutnya dimasukkan dalam database rekam jejak hakim terintegrasi.

**Pengukuran Kinerja**

Perhitungan Indikator Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 dapat dilihat dalam table berikut:

**Table 3.10. Rumus Hitung Pendalaman Kasus**

Variabel Ukur	Jumlah	Perhitungan indikator kinerja
<b>Jumlah Pendalaman Kasus</b>	<b>15</b>	<b>Rumus Hitung:</b>
<b>Jumlah Pendalaman Kasus yang Ditindaklanjuti</b>	<b>15</b>	$\frac{\text{Jumlah Pendalaman Kasus yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pendalaman Kasus}} \times 100\%$ $\frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$

**Catatan:**

- **Investigasi Penanganan Laporan/Informasi Masyarakat, 13 laporan**
- **Investigasi Pendalaman Kasus (STO), 2 laporan**

Analisis perbandingan antara target tahun 2024, realisasi 2023, 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.9. Persandingan Target dan Realisasi Pendalaman Kasus Terkait Dugaan Pelanggaran KEPPH yang Ditindaklanjuti**

IKU	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi								
Persentase Target Pendalaman Kasus Terkait Dugaan Pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

#### **D. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN**

##### **1. Sasaran Kinerja 1**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada pelaksanaan sasaran kegiatan 1, 'Tersedianya Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi', diukur dari capaian kinerja pada indikator "Persentase Database Rekam Jejak Yang Terintegrasi dan Dipetakan". Sasaran Kegiatan 1, telah melampaui target Hal ini karena beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut, antara lain :

- **Keberhasilan**

Keberhasilan Pencapaian target indikator "Persentase Database Rekam Jejak Yang Terintegrasi dan Dipetakan" tahun 2024:

- 1) Dukungan dari Pimpinan, pejabat struktural dan pegawai di Biro Investigasi dalam menetapkan target pada dokumen Penetapan Kinerja tahunan yang selaras dengan target pada dokumen RENSTRA Komisi Yudisial Tahun 2020-2024;

- 2) Komitmen pimpinan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan peran unit kerja yang bertujuan pada tercapainya visi misi Biro Investigasi;
- 3) Biro Investigasi telah membangun sistem terintegrasi terkait data rekam jejak hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, data rekam jejak hakim yang sudah sesuai dengan standar (standar yang ada pada KYRI) yang dimiliki adalah sebanyak 3.269 hakim<sup>1</sup>, data realisasi ini sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan sesuai dengan Renstra KY.

▪ **Kegagalan**

Dalam memenuhi target indikator “Persentase Database Rekam Jejak Yang Terintegrasi dan Dipetakan” tahun 2024 tidak terlepas pula dari faktor kegagalan. Hal ini terlihat dari:

Adanya kendala sinkronisasi data dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri;

Atas kondisi tersebut pada tahun 2024, Biro Investigasi telah berupaya melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:

Tim Biro Investigasi bersama Tim Pusat Data dan Layanan Informasi (Palinfo) KY melakukan komunikasi dengan Tim Teknis Dirjen Dukcapil untuk akses data dan sinkronisasi database rekam jejak hakim.

## 2. Sasaran Kinerja 2

- 1) Sasaran Kinerja 2, Terlaksananya Kegiatan Deteksi Dini diukur dari capaian kinerja pada 2 (dua) indikator yaitu: Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini, dan Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran kinerja pada indikator ‘Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini’ telah sesuai target yang telah ditetapkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

▪ **Keberhasilan**

Keberhasilan Pencapaian target indikator “Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini” tahun 2024:

- 1) Dukungan dari Pimpinan, pejabat struktural dan pegawai di Biro Investigasi dalam menetapkan target pada dokumen Penetapan Kinerja

---

<sup>1</sup> Jumlah 3269 hakim diambil dari tahun 2021 = 540 hakim, tahun 2022 = 735 hakim, dan tahun 2023 target 838, realisasi sebesar 954 hakim dan Tahun 2024 sebesar 1050 hakim

tahunan yang selaras dengan target pada dokumen RENSTRA Komisi Yudisial Tahun 2020-2024;

- 2) Komitmen pimpinan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan peran unit kerja yang bertujuan pada tercapainya visi misi Biro Investigasi;

#### ▪ **Kegagalan**

Dalam memenuhi target indikator target indikator “Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini” tahun 2024 tidak terlepas pula dari faktor kegagalan. Hal ini terlihat dari:

- 1) Masih sulit mengukur Tingkat kualitas data deteksi dini;
- 2) Adanya pemotongan anggaran sehingga sampel wilayah untuk melakukan validasi isu terbatas.

Atas kondisi tersebut pada tahun 2024, Biro Investigasi telah berupaya melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Bagian Monitoring dan Evaluasi Biro Perencanaan KYRI dalam menentukan tingkat kualitas data deteksi dini;
- 2) Mengusulkan penambahan anggaran khususnya untuk kegiatan deteksi dini.

- a) Sasaran Kinerja 2, Tersedianya Data Deteksi Dini yang Berkualitas sasaran kinerja pada indikator ‘Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti’ telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

#### ▪ **Keberhasilan**

Keberhasilan Pencapaian target indikator “Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti” tahun 2024:

- 3) Dukungan dari Pimpinan, pejabat struktural dan pegawai di Biro Investigasi dalam menetapkan target pada dokumen Penetapan Kinerja tahunan yang selaras dengan target pada dokumen RENSTRA Komisi Yudisial Tahun 2020-2024;
- 4) Komitmen pimpinan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan peran unit kerja yang bertujuan pada tercapainya visi misi Biro Investigasi;

#### ▪ **Kegagalan**

Dalam memenuhi target indikator target indikator “Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti” tahun 2024 tidak terlepas pula dari faktor kegagalan. Hal ini terlihat dari:

- 1). Keterbatasan SDM, sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan deteksi dini;
- 2). Adanya pemotongan anggaran sehingga sampel wilayah untuk melakukan validasi isu terbatas.

Atas kondisi tersebut pada tahun 2024, Biro Investigasi telah berupaya melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:

- 1) Mengusulkan penambahan SDM, sarana dan prasaran ke Biro Umum agar bisa menjalankan tugas dan fungsi Biro Investigasi secara optimal dan profesional;
- 2) Mengusulkan penambahan anggaran khususnya untuk kegiatan deteksi dini.

### **3. Sasaran Kinerja 3**

Sasaran kegiatan 3, ‘Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu’ diukur dari capaian kinerja pada Indikator ‘Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti’ telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

#### ▪ **Keberhasilan**

Keberhasilan Pencapaian target indikator “Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti” tahun 2024:

- 1) Dukungan dari Pimpinan, pejabat struktural dan pegawai di Biro Investigasi dalam menetapkan target pada dokumen Penetapan Kinerja tahunan yang selaras dengan target pada dokumen RENSTRA Komisi Yudisial Tahun 2020-2024;
- 2) Komitmen pimpinan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan peran unit kerja yang bertujuan pada tercapainya visi misi Biro Investigasi;
- 3) Adanya sinergi antara Tim Investigasi dan Tim Pemeriksa Biro Pengawasan Perilaku Hakim.

#### ▪ Kegagalan

Dalam memenuhi target indikator target indikator “Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti” tahun 2024 tidak terlepas pula dari faktor kegagalan. Hal ini terlihat dari:

- 1). Penanganan laporan hasil investigasi yang berlarut-larut di Biro Pengawasan Perilaku Hakim;
- 2). Peralatan investigasi yang *out of date* (ketinggalan jaman);
- 3). Kurangnya pembinaan informan investigasi.

Atas kondisi tersebut pada tahun 2024, Biro Investigasi telah berupaya melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:

- 1) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Tim Pemeriksa di Biro Pengawasan Perilaku Hakim (Biro Waskim). Selain itu, membentuk Tim Reaksi Cepat antara Biro Investigasi dan Biro Waskim dalam menangani laporan masyarakat.
- 2) Mengusulkan peralatan khusus investigasi ke Biro Umum;
- 3) Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap informan.

#### E. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari persentase pagu anggaran kinerja dan persentase realisasi anggaran kinerja. Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari penyandingan ketercapaian target output pada Indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya.

**Tabel 3.10. Efisiensi Anggaran**

KRO	RO	Alokasi Anggaran (AAKRO)	Realisasi Anggaran (RAKRO)	CRO per KRO	Efisiensi RO Satker
3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	5.031.047.000	5.009.510.665	100.19%	0,62%
3866.BIB.001	Investigasi Awal di Pengadilan Tingkat	58.800.000	58.800.000		

KRO	RO	Alokasi Anggaran (AAKRO)	Realisasi Anggaran (RAKRO)	CRO per KRO	Efisiensi RO Satker
	Pertama/Banding/Mahkamah Agung				
3866.BIB.002	Database Rekam Jejak Hakim Terintegrasi	1.126.322.000	1.120.375.805		
3866.BIB.U02	Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik	1.003.847.000	1.002.599.880		
3866.BIB.U03	Investigasi Pendalaman Kasus (STO)	359.512.000	357.054.705		
3866.BIB.U04	Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim Agung	1.987.378.000	1.985.913.477		
3866.BIC.U05	Investigasi pencegahan pelanggaran disiplin dan etik	495.188.000	484.766.798		

Tahun 2024 % capaian anggaran Biro Investigasi sebesar 100,19% dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.031.047.000 dan realisasi anggaran Rp 5.009.510.665 sehingga mengacu rumusan yang ada dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 efisiensi anggaran Biro Investigasi sebesar 0,62%.

## F. REALISASI ANGGARAN

Tabel. 3.13 Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Kode	Uraian KRO/RO/Komponen	Target	Realisasi	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	%
<b>3866</b>	<b>Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim</b>			5.204.501.000	<b>5.031.047.000</b>	<b>5.009.510.665</b>	<b>99,57%</b>
<b>3866.BIB</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat</b>						
<b>3866.BIB.001</b>	<b>Investigasi Awal di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung</b>	12	12		58.800.000	58.800.000	100%
051	Pelaksanaan Investigasi Awal di Pengadilan Tingkat	12	12		58.800.000	58.800.000	100%

Kode	Uraian KRO/RO/Komponen	Target	Realisasi	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	%
	Pertama/Banding/Ma hkamah Agung						
<b>3866.BI B.U02</b>	<b>Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>1.012.327.000</b>	<b>1.003.847.000</b>	<b>1.002.599.880</b>	<b>99,88%</b>
053	Pemetaan dan Penelusuran Awal Laporan/Informasi			276.379.000	275.979.000	275.483.487	99,82%
055	Penyelenggaraan Investigasi Penanganan Laporan/Informasi	12	13	735.948.000	727.868.000	727.116.393	99,90%
<b>3866.BI B.U03</b>	<b>Investigasi Pendalaman Kasus (STO)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>377.628.000</b>	<b>300.764.000</b>	<b>300.192.120</b>	<b>99,81%</b>
<b>051</b>	Analisis Kasus			4.992.000	4.992.000	4.900.000	98,16%
<b>052</b>	Penyusunan Laporan Hasil Analisis			4.992.000	4.992.000	3.530.100	70,72%
<b>053</b>	Penyelenggaraan Investigasi Pendalaman Kasus (STO)			303.348.000	300.764.000	300.192.120	98,81%
054	Ekspose Hasil Pendalaman Kasus (STO)			64.296.000	48.764.000	48.432.485	99,32%
<b>3866.BI B.U04</b>	<b>Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim Agung</b>	<b>40</b>	<b>43</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>1.987.378.000</b>	<b>1.985.913.477</b>	<b>99,93%</b>
051	Pengumpulan dan penyiapan bahan data awal calon hakim agung			58.280.000	56.120.000	55.697.549	99,25%
052	Penyelenggaraan Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim Agung			1.879.920.000	1.873.920.000	1.872.922.350	99,95%
<b>053</b>	<b>Penyusunan Laporan, Ekspose dan Evaluasi Hasil Penelusuran Rekam Jejak Calon Hakim</b>			61.800.000	<b>57.338.000</b>	57.293.578	<b>99,92%</b>

Kode	Uraian KRO/RO/Komponen	Target	Realisasi	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	%
	dan Calon Hakim Agung						
<b>3866. BIB.U05</b>	<b>Investigasi pencegahan pelanggaran disiplin dan etik</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>495.188.000</b>	<b>484.766.798</b>	<b>97,90%</b>
051	Pemetaan dan Penelitian Awal			36.154.000	36.154.000	35.649.893	98,61%
052 A	Validasi isu Investigasi Deteksi Dini			413.660.000	182.968.000	182.844.135	99,93%
<b>B</b>	<b>Investigasi Bersama Secara Tersembunyi (Mysterious Shopper)</b>			<b>226.100.000</b>	<b>220.884.000</b>	214.302.770	97,02%
<b>052</b>	<b>Belanja Honor Output Kegiatan</b>				<b>67.500.000</b>	<b>67.500.000</b>	100%
053	Penyusunan Analisis dan Usulan Rekomendasi			140.932.000	55.182.000	51.970.000	94,18%
<b>3866.BI B.002</b>	<b>Database Rekam Jejak Hakim Terintegrasi</b>	<b>1038</b>	<b>1050</b>	<b>1.165.000.000</b>	<b>1.126.322.000</b>	<b>1.120.375.805</b>	<b>99,47%</b>
051	Pemetaan dan pemutakhiran Database Rekam Jejak Hakim			702.327.000	663.649.000	663.002.580	99,90%
<b>A</b>	<b>Pengumpulan dan Identifikasi Data RJH pad KY dan MA</b>				65.169.000	65.071.420	99,85%
<b>B</b>	<b>Profiling Hakim Berkelanjutan</b>			518.376.000	483.600.000	483.291.051	99,94%
<b>C</b>	<b>Pembentukan dan Pembinaan Informan Strategis</b>			115.840.000	114.880.000	114.640.109	99,79%
<b>052</b>	<b>Pemutakhiran dan Pengembangan Sistem Informasi Database Rekam Jejak Hakim Terintegrasi</b>			156.000.000		155.628.001	99,76%

Kode	Uraian KRO/RO/Komponen	Target	Realisasi	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	%
053	Pemeliharaan dan pendokumentasian arsip database rekam jejak hakim			147.913.000	75.257.000	73.813.498	98,08%
054	Evaluasi dan Diseminasi Kinerja Biro Investigasi			158.760.000	231.416.000	227.931.726	98,49%

## BAB IV PENUTUP

Secara umum Biro Investigasi telah memenuhi capaian kinerja biro yang telah ditetapkan pada saat penyusunan rencana anggaran dan kegiatan tahun 2024.

**Tabel. 4.1 Capaian Kinerja Tahun 2024**

Kegiatan Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim Agung		Target	Realisasi	% Capaian
<b>Sasaran Kegiatan 1:</b> Tersedianya Database Rekam Jejak Hakim Yang Terintegrasi				
Persentase Database Rekam Jejak hakim yang terintegrasi dan terpetakan		95%	101%	106%
<b>Sasaran Kegiatan 2:</b> Tersedianya data deteksi dini yang berkualitas				
1.	Tingkat Kualitas Data Deteksi Dini	Sangat Baik	Sangat Baik	100%
2.	Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Yang Ditindaklanjuti	1 Rek	1	100%
<b>Sasaran Kegiatan 3:</b> Terlaksananya Kegiatan Pendalaman Kasus Tertentu				
Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti		100%	107%	107%

Langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Biro Investigasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dengan:

1. Penguatan Kelembagaan dalam hal kerjasama dengan lembaga/institusi luar sebagai *stakeholders* untuk memudahkan terkait permintaan data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan tugas investigasi.
2. Terintegrasinya Sistem Informasi yang ada di Komisi Yudisial sehingga mempercepat proses pencarian dan penyampaian data terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh hakim.
3. Harmonisasi alur kerja setiap biro/unit di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang beririsan dengan investigasi.
4. Pembaharuan dan penyempurnaan bisnis proses dan SOP Biro Investigasi.

5. Melakukan komunikasi yang intensif antara pihak yang terkait perencanaan anggaran (Biro Renki) di KY dengan pihak Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan agar mengupayakan untuk pembukaan blokir anggaran tidak dilakukan di akhir tahun.
6. Dalam penanganan laporan masyarakat kerjasama di internal KY yaitu dengan Biro Pengawasan Perilaku Hakim waskim dapat dilakukan secara fleksibel dan efektif dalam mempercepat proses penanganan perkara.
7. Menambah personil investigasi dan melakukan peremajaan peralatan khusus dalam mendukung kerja-kerja investigasi. Selain itu juga perlu peningkatan kompetensi SDM secara terukur, berjenjang, dan kontinyu.
8. Menyediakan alokasi anggaran untuk pembinaan jejaring/informan. Selain itu juga perlu meningkatkan dan mengefektifkan kerjasama dengan *stakeholder* eksternal seperti dengan MA (Bawas MA), PPATK, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian baik dalam pelaksanaan pendalaman kasus (PK) maupun PRJ CHA.

Akhirnya dengan disusun laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait tugas fungsi Biro Investigasi. sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal, Laporan Kinerja ini menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja terhadap perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga kontribusi Biro Investigasi bisa dirasakan dalam mewujudkan peradilan bersih.

**Jakarta, Februari 2025**

**Kepala Biro Investigasi**



Handarbeni Sayekti, S.H., M.H  
NIP 19740802 199803 2 004

# **LAMPIRAN**



**SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BIRO INVESTIGASI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Handarbeni Sayekti, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Biro Investigasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arie Sudihar, S.H., M.Hum.

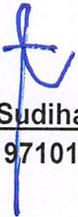
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
Arie Sudihar, S.H., M.Hum.  
NIP 19710123 199603 1 003

Jakarta, 2 Januari 2024

Pihak Pertama,

  
Handarbeni Sayekti, S.H., M.H.  
NIP. 19740802 199803 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BIRO INVESTIGASI**

**Sasaran Program:**

**Tersedianya profil Hakim sesuai dengan standar**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya kegiatan Pendalaman kasus tertentu	Persentase target pendalaman kasus terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang ditindaklanjuti	100%
2	Tersedianya database rekam jejak hakim yang terintegrasi	Persentase database rekam jejak hakim yang terintegrasi dan terpetakan	95%
3	Tersedianya data deteksi dini yang berkualitas	1. Tingkat kualitas data deteksi dini	Sangat Baik
		2. Rekomendasi hasil deteksi dini yang ditindaklanjuti	1 Rekomendasi

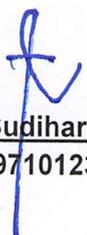
**Kegiatan:**

Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim

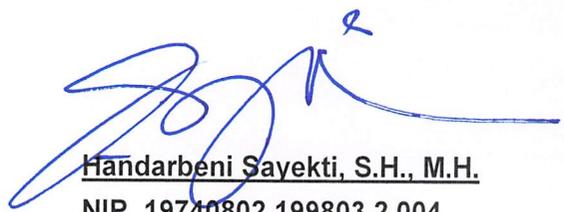
**Anggaran:**

Rp5.204.501.000,00

**Sekretaris Jenderal,**

  
**Arie Sudihar, S.H., M.Hum.**  
NIP 19710123 199603 1 003

Jakarta, 2 Januari 2024  
Kepala Biro Investigasi,

  
**Handarbeni Sayekti, S.H., M.H.**  
NIP. 19740802 199803 2 004



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA



**Komisi Yudisial  
Republik Indonesia**

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat  
Telp. : 187 or (021) 390 5876  
Fax. : (021) 390 6215. PO BOX 2685  
Email : kyri@komisiyudisial.go.id